

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007-2013
Analysi Of Financial Performance In Departement Of Financial Managing Of Finance And Asset On Klaten Regency Period 2007-2013

Oleh : **Muhammad Yogi Perwira**
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
yogiperwira.y@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten jika dilihat dari: (1) Rasio Efektivitas. (2) Rasio Pajak Daerah (PD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (3) Rasio Kemandirian. (4) Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas, Analisis *Trend* Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Analisis *Trend* Rasio Kemandirian.

Data yang digunakan adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2007 sampai dengan 2013. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis data adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis, dan interpretasi data yang akhir pada kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah diperoleh.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dilihat dari Rasio Efektivitas untuk tahun 2007, 2011, 2012, dan 2013 sudah Efektif, karena nilai yang diperoleh lebih dari 100%, yaitu sebesar 101,65%, 100,99%, 109,81%, dan 134,90%. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dilihat dari Rasio Efektivitas untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 tidak Efektif, karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%, yaitu sebesar 87,33%, 70,53%, dan 88,89%. (2) Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2007 sampai tahun 2013 dapat digolongkan sedang hingga cenderung baik, Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang paling rendah yaitu sebesar 29,82% terjadi pada tahun 2007 yang digolongkan sedang, dan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten paling tinggi yaitu sebesar 47,01% terjadi pada tahun 2008 yang digolongkan baik. (3) Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong sangat rendah, Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,21%, sedangkan nilai Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,30%. (4) Analisis *Trend* Kinerja Keuangan DPPKA Kabupaten Klaten untuk Rasio Efektivitas dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang semakin meningkat, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2007 hingga tahun 2013 menggambarkan kecenderungan arah penerimaan Pajak Daerah serta kecenderungan arah perkembangan kemandirian keuangan yang cenderung naik dilihat dari Analisis *Trend* untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian, dan Analisis *Trend*.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the financial performance Klaten regency viewed from: (1) Effectiveness Ratio. (2) Local Tax Ratio revenue. (3) Independence Ratio. (4) Analisis Trend for Effectiveness Ratio, Trend Analysis Ratioon the Regional Tax and Regional Income Ratio and Analysis of Trend Independence ratio.

The data is the Actual Budget Klaten regency fiscal year 2007 to 2013. The data collection technique is documentation. The method of data analysis is descriptive quantitative method which aims to collect, collate, compare, analyze, and interpretation of the data that the end of the conclusions based on the data that has been obtained.

Results showed that: (1) Financial Performance Klaten Regency viewed from effectiveness ratio for 2007, 2011, 2012, and 2013 has been effective, because the value obtained more than 100%, there are 101.65%, 100.99%, 109.81% and 134.90%. Financial Performance Klaten Regency seen from effectiveness ratio for 2008, 2009, and 2010 are not effective, because they value obtained is less than 100%, there are 87.33%, 70.53%, and 88.89%. (2) Financial Performance Klaten Regency seen from the ratio of regional tax on the original income for the year 2007 - 2013 can be classified as moderate until well indicate, Financial Performance Klaten Regency most low at 29.82% occurred in 2007, moderate classified, Financial Performance Klaten Regency and the highest in the amount of 47.01% occurred in 2008 good classified. (3) Financial Performance of Klaten Regency seen as very low of Independence ratio, Financial Performance Klaten Regency lowest occurred in 2008 in the amount of 4.21%, the value of financial performance Klaten Regency highest occurred in 2013 in the amount of 7, 30%. (4) Financial Performance Trend Analysis Klaten Regency for Effectiveness Ratio from 2007-2013 which is increasing, Local Tax Ratio on Local Revenue and Independence Financial Performance Ratios Klaten Regency from 2007-2013 illustrates the trend toward regional tax revenues and trends towards the development of financial independence tend to rise seen from Trend Analysis ratio on Regional Tax on Local Revenue and independence ratio.

Keywords: Effectiveness Ratio, Local Tax Ratio to revenue, Independence Ratio, Analisis Trend.

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat

kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mempunyai dua pengaruh yang nyata yaitu: ke-1 mendorong peningkatan partisipasi, prakasa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Ke-2, memperbaiki alokasi faktor-faktor produksi dengan mendesentralisasikan pengambilan keputusan ke daerah. Perbaikan pada alokasi faktor-faktor produksi itu muncul karena adanya efisiensi teknis dalam pengambilan keputusan karena tidak perlu meminta persetujuan dari pemerintah

pusat, dan efisiensi ekonomis yang berupa terciptanya alokasi faktor-faktor produksi yang sesuai preferensi masyarakat dengan daerah pengambilan keputusan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama untuk melaksanakan otonomi daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Kinerja Keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Sutaryo, dkk:2010). Tujuan pelaporan keuangan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah Daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 309.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, APBD pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur berorientasi pada pencapaian tingkat kerja tertentu. APBD harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan karena masih buruknya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Buruknya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah berdampak pada buruknya penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD adalah salah satu aspek pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat

berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemda mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila Pemda mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Dengan otonomi daerah, maka dampak yang akan dirasakan oleh pemerintah daerah bukan hanya menyangkut perubahan sistem dan struktur pemerintah daerah, melainkan dan terutama menyangkut kemampuan dan keterbatasan sumber daya manusia aparatur baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien, dan memiliki akuntabilitas. Sumber daya manusia yang diperlukan bukan hanya memiliki keterampilan dan kemampuan profesional di bidangnya, tetapi juga memiliki etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi serta pengabdian kepada masyarakat.

Arta Sadjiarto (2000:146) mengemukakan bahwa keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ini akan memungkinkan Pemerintah untuk menentukan anggaran dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode

pengukuran Kinerja Keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Klaten yaitu: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu bantuan daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Realita hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat ke daerah melalui proses pembangunan daerah. Hal ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD dengan total penerimaan daerah dibanding besarnya bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak-pajak daerah, restribusi daerah, laba bersih dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: "Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007-2013".

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Klaten yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 294 Klaten.

2. Objek penelitian

Obyek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari pendapatan daerah terhadap APBD. Alasan penulis mengambil obyek ini adalah untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Selain itu penulis juga ingin mengetahui profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data tersebut merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) tahun anggaran 2007 sampai dengan 2013.

b. Sumber data

Data diperoleh dari sumber instansi yang terkait yaitu :

- 1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2007 sampai dengan 2013.
- 2) Gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui benda-benda tertulis seperti dokumen dan pembukuan pada pemerintah Kabupaten Klaten.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis, dan interpretasi data yang akhir pada diteliti (kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah diperoleh. Hasilnya ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten) jika ditinjau melalui rasio keuangan APBD. Dalam penelitian ini teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah:

a. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus Rasio Efektivitas (Abdul Halim, 2007: 234) adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2010: 143):

- 1) Sangat efektif : > 100%
- 2) Efektif : 100%
- 3) Cukup efektif : 90%-99%
- 4) Kurang efektif : 75%-89%
- 5) Tidak efektif : <75%

b. Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Rumus Rasio Pajak Daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Mohamad Mahsun, 2013: 153) :

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika dan Luh Gede Sri Artini, 2012: 739) adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai 00,00% - 10,00% dikatakan sangat kurang.
- 2) Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% dikatakan kurang.
- 3) Jika diperoleh nilai 20,01% - 30,00% dikatakan sedang.
- 4) Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% dikatakan cukup.
- 5) Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% dikatakan baik.
- 6) Jika diperoleh nilai > 50% dikatakan sangat baik.

c. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dan pinjaman pihak eksternal. Rumus Rasio Kemandirian (Abdul Halim, 2007: 232), adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian (Waskito Hadi, 2010: 33-34), dapat disajikan dalam tabel seperti di bawah ini :

Tabel 2. Pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah.

Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian (%)
Rendah sekali	0 – 25
Rendah	25 – 50
Sedang	50 – 75
Tinggi	75 – 100

Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi), semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

d. Analisis *Trend*

Untuk mengetahui perkembangan dan proyeksi Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Kemandirian Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai dengan 2013, diperlukan Analisis *Trend* dengan metode kuadrat kecil (Least Square). Dalam perhitungan ini menggunakan Analisis time series dengan persamaan *trend* sebagai berikut : $Y' = a + bX$.

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum YX}{\sum X^2}$$

Keterangan :

Y' = Perkembangan Kemandirian, Efektivitas dan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Y = Variabel tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = Konstanta

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan

X = Koefisien

C. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten

Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Klaten dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2007 sampai 2013. Di bawah ini empat macam Rasio Kinerja yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten untuk tahun 2007 sampai 2013, yaitu meliputi:

a. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas yang akan dianalisis adalah tahun 2007-2013, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Kabupaten Klaten tahun anggaran 2007-2013.

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2007	41.855.189.000,00	42.547.074.202,00	101,65%
2008	43.910.145.000,00	38.347.614.632,00	87,33%
2009	66.073.046.000,00	46.603.876.000,00	70,53%
2010	61.743.899.000,00	54.886.005.749,00	88,89%
2011	71.580.476.000,00	72.290.993.848,00	100,99%
2012	77.185.112.000,00	84.755.834.704,00	109,81%
2013	85.574.358.000,00	115.441.420.053,00	134,90%

Sumber data: DPPKA Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten bila diukur berdasarkan Rasio Efektivitas untuk tahun 2007, 2011, 2012, dan 2013 sudah efektif, karena nilai yang diperoleh lebih dari 100% yaitu sebesar 101,65%, 100,99%, 109,81%,

dan 134,90%. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten bila diukur berdasarkan Rasio Efektivitas untuk tahun 2008, 2009, 2010 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten kurang efektif, nilai yang diperoleh kurang dari 100%, yaitu sebesar 87,33%, 70,53%, 88,89%. Pada tahun 2008 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah hanya mendapat 85,82% dari Anggaran. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hanya mendapat 57,47% dari Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya mendapat 67,3% dari Anggaran. Pada tahun 2009 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah hanya mendapat 92,46% dari Anggaran. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah hanya mendapat 88,99% dari Anggaran. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hanya mendapat 74,82% dari Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya mendapat 45,25% dari Anggaran. Pada tahun 2010 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah hanya mendapat 87,63% dari Anggaran. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah hanya mendapat 89,54% dari Anggaran. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hanya mendapat 78,63% dari Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya mendapat 92,80% dari Anggaran.

b. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini digunakan untuk menilai/mengukur kinerja Kabupaten Klaten dalam menghasilkan pendapatan dari Pajak Daerah.

Tabel 4. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2007-2013.

Tahun anggaran	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Rasio PD terhadap PAD
2007	12.689.833.307,00	42.547.074.202,00	29,82%
2008	18.026.871.390,00	38.347.614.632,00	47,01%
2009	18.921.063.434,00	46.603.876.930,00	40,60%
2010	19.549.880.442,00	54.886.005.749,00	35,62%
2011	28.261.724.817,00	72.290.993.848,00	39,10%
2012	30.472.348.079,00	84.755.834.704,00	35,95%
2013	52.818.646.651,00	115.441.420.053,00	45,75%

Sumber: DPPKA Kabupaten Klaten

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten bila diukur berdasarkan Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2007-2013 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dapat digolongkan sedang hingga baik, hal ini terlihat dari tabel 4 tersebut yang memuat bahwa nilai yang paling rendah yaitu sebesar 29,82% terjadi pada tahun 2007 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang digolongkan sedang, dan nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 47,01% terjadi pada tahun 2008 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang digolongkan baik.

c. Rasio Kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan

pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan dari pinjaman.

Tabel 5. Rasio Kemandirian Kabupaten Klaten tahun anggaran 2007-2013.

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2007	42.547.074.202,00	825.137.326.407,00	5,16%
2008	38.347.614.632,00	910.101.402.189,00	4,21%
2009	46.603.876.930,00	922.915.374.294,00	5,05%
2010	54.886.005.749,00	972.029.599.717,00	5,65%
2011	72.290.993.848,00	1.145.206.557.368,00	6,31%
2012	84.755.834.704,00	1.383.267.638.453,00	6,13%
2013	115.441.420.053,00	1.582.082.180.439,00	7,30%

Sumber: DPPKA Kabupaten Klaten

Berdasarkan perhitungan tabel 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tergolong sangat rendah sekali, nilai yang terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,21%, sedangkan nilai yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,30%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

d. Analisa Trend

Dalam perhitungan ini menggunakan analisis *time series* dengan persamaan *trend* sebagai berikut: $Y' = a + bX$

Keterangan :

Y' = Perkembangan Kemandirian, Efektivitas dan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = Konstanta

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan

X = Koefisien

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum YX}{\sum X^2}$$

Keterangan :

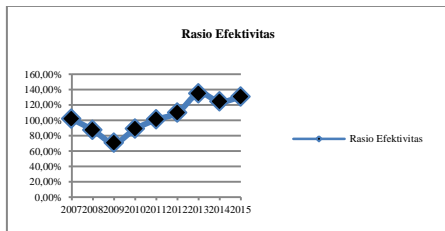
Y = Variabel tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Pajak teradap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = Konstanta

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan

X = Koefisien

1. Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas.



Gambar 1. Realisasi Rasio Efektivitas Kabupaten Klaten tahun 2007-2013

Tabel 6. *Trend* untuk Rasio Efektivitas Kabupaten Klaten tahun anggaran 2007-2013.

Tahun	X	Tingkat Efektivitas (Y)	X.Y	X ²
2007	-3	101,65%	-304,95%	9
2008	-2	87,33%	-174,66%	4
2009	-1	70,53%	-70,53%	1
2010	0	88,89%	0	0
2011	1	100,99%	100,99%	1
2012	2	109,81%	219,62%	4
2013	3	134,90%	404,7%	9
Total	0	694,1%	175,17%	28

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{694,1\%}{7} = 99,157\%$$

$$Y' = a + bX$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2} = \frac{175,17\%}{28} = 6,26\%$$

$$Y' = 99,157\% + 6,26\%.(X)$$

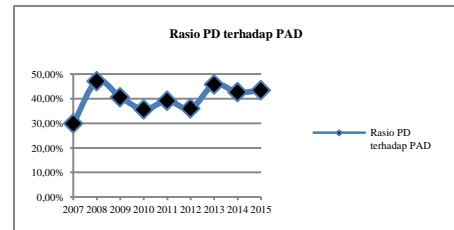
Hasil Perhitungan *Trend*:

$$Y' (2014) = 99,157\% + (6,26\%).(4) = 124,197\%$$

$$Y' (2015) = 99,157\% + (6,26\%).(5) = 130,457\%$$

Diketahui bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten bila diukur berdasarkan *Trend* Rasio Efektivitas menggambarkan kecenderungan arah perkembangan efektivitas keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang cenderung meningkat dan peramalan tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2014 maka efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten akan semakin naik menjadi 124,197% dan tahun 2015 menjadi 130,457%.

2. Analisis *Trend* untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 2. Realisasi Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tahun 2007-2013.

Tabel 7. *Trend* untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2007-2013.

Tahun	X	Tingkat Efektivitas (Y)	X.Y	X ²
2007	-3	29,82%	-89,46%	9
2008	-2	47,01%	94,02%	4
2009	-1	40,60%	40,60%	1
2010	0	35,62%	0	0
2011	1	39,10%	39,10%	1
2012	2	35,95%	71,9%	4
2013	3	45,74%	137,25%	9
Total	0	273,85%	24,7%	28

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{273,84\%}{7} = 39,12\%$$

$$Y' = a + bX$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2} = \frac{24,17\%}{28} = 0,86\%$$

$$Y' = 39,12\% + 0,89\%.(X)$$

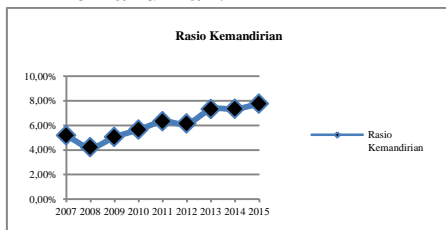
Hasil Perhitungan *Trend*:

$$Y'(2014) = 39,12\% + (0,89\%).(4) = 42,56\%$$

$$Y'(2015) = 39,12\% + (0,89\%).(5) = 43,42\%$$

Diketahui bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten bila diukur berdasarkan *Trend* Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kecenderungan arah perkembangan penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang cenderung naik dan peramalan tahun yang akan datang maka kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah akan semakin naik yaitu pada tahun 2014 menjadi 42,56% dan untuk tahun 2015 menjadi 43,42%.

3. Analisis *Trend* untuk Rasio Kemandirian.



Gambar 3. Realisasi Rasio Kemandirian Kabupaten Klaten tahun 2007-2013

Tabel 8. *Trend* untuk Rasio Kemandirian tahun anggaran 2007-2013.

Tahun	X	Tingkat Efektivitas (Y)	X.Y	X ²
2007	-3	5,16%	-15,48%	9
2008	-2	4,21%	-8,42%	4
2009	-1	5,05%	-5,05%	1
2010	0	5,65%	0	0
2011	1	6,31%	6,31%	1
2012	2	6,13%	12,26%	4
2013	3	7,30%	21,9%	9
Total	0	39,81%	11,52%	28

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{39,81\%}{7} = 5,69\%$$

$$Y' = a + bX$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2} = \frac{11,52\%}{28} = 0,41\%$$

$$Y' = 5,69\% + 0,41\%.(X)$$

Hasil Perhitungan *Trend*:

$$Y'(2014) = 5,69\% + (0,41\%).(4) = 7,33\%$$

$$Y'(2015) = 5,69\% + (0,41\%).(5) = 7,74\%$$

Diketahui bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten bila diukur berdasarkan *Trend* Rasio Kemandirian menggambarkan kecenderungan arah perkembangan Kemandirian Kinerja dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang cenderung naik dan untuk peramalan tahun yang akan datang maka kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan akan naik pada tahun 2014 menjadi 7,33% dan untuk tahun 2015 menjadi 7,74%.

D. Pembahasan

1. Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan pada tabel 3, menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dan penurunan. Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang semula di tahun 2007 sebesar Rp41.855.189.000 atau sebesar 4,83% dari total pendapatan. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp43.910.145.000 tapi mengalami penurunan dari segi presentasi menjadi 4,56% dari total pendapatan. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi Rp66.073.046.000 atau menjadi 6,79% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp61.734.899.426 atau menjadi 5,73% dari total pendapatan. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp71.580.476.000 tapi mengalami penurunan dari segi presentasi menjadi 5,32% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp77.185.112.000 tapi mengalami penurunan dari segi presentasi menjadi 5,19% dari total pendapatan. Pada tahun 2013

mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp85.574.358.000 tapi mengalami penurunan dari segi presentasi menjadi 5,09% dari total pendapatan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten juga mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2007 sebesar Rp42.547.074.202 atau 4,87% dari total pendapatan. Pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi Rp38.347.614.632 atau menjadi 3,93% dari total pendapatan. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi Rp46.603.876.930 atau menjadi 4,73% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp54.886.005.749 atau menjadi 5,18% dari total pendapatan. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp72.290.993.848 atau menjadi 5,29% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp84.755.834.704 atau menjadi 5,61% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp115.441.420.053 atau menjadi 6,65% dari total pendapatan.

Berdasarkan penelitian pada tabel 3, untuk Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten untuk tahun 2007 sebesar 101,65%, tahun 2008 sebesar 87,33%, tahun 2009 sebesar 70,53%, tahun 2010 sebesar 88,89%, tahun 2011 sebesar 100,99%, tahun 2012 sebesar 109,81%, tahun 2013 sebesar 134,90%. Untuk tahun 2008, 2009, 2010 Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tidak berjalan secara Efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%, yaitu 87,33%, 70,53%, 88,89%. Untuk tahun 2007, 2011, 2012, 2013 sudah berjalan secara Efektif, karena nilai yang diperoleh lebih dari 100% yaitu

101,65%, 100,99%, 109,81%, 134,90%.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 3, dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas selama tujuh tahun pada Kabupaten Klaten memiliki rata-rata tingkat Efektivitas yang Efektif. Rasio Efektivitas yang masih sangat kurang pada tahun 2008, 2009, 2010 mengakibatkan kemampuan daerah Kabupaten Klaten dalam membiayai pelaksanaan Otonomi daerah yang masih sangat kurang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum dapat diandalkan bagi daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, karena kurang relatif rendahnya basis pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya Pendapatan Asli Daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan/penerapannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk itu sendiri terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan dari Provinsi, dan Pendapatan Sah Lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang mungkin untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparatur pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta serta juga program peningkatan Pendapatan Asli Daerah misalnya BUMD sektor potensial.

2. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan pada tabel 4, menunjukkan bahwa Pajak Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dan penurunan. Pajak Daerah yang semula di tahun 2007 sebesar Rp12.689.833.307 atau sebesar 29,83% dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2008 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp18.026.871.390 atau sebesar 47,01% dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2009 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp18.921.063.434 tapi mengalami penurunan dari segi presentasi menjadi 40,60% dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2010 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp19.549.880.442 tapi mengalami penurunan dari segi presentasi menjadi 35,62% dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp28.261.724.817 atau sebesar 39,10% dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2012 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp30.472.348.079 tapi mengalami penurunan dari segi presentasi menjadi 35,95% dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2013 mengalami kenaikan dari segi anggaran menjadi Rp52.818.646.651 atau sebesar 45,75% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten juga mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2007 sebesar Rp42.547.074.202 atau sebesar 4,87% dari total pendapatan. Tahun 2008 mengalami penurunan menjadi Rp38.347.614.632 atau sebesar 3,93% dari total pendapatan. Tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi Rp46.603.876.930 atau sebesar 4,73% dari total pendapatan. Tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp54.886.005.749 atau sebesar 5,18% dari total

pendapatan. Tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp72.290.993.848 atau sebesar 5,30% dari total pendapatan. Tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp84.755.834.704 atau sebesar 5,61% dari total pendapatan. Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp115.441.420.053 atau sebesar 6,65% dari total pendapatan.

Untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten untuk tahun 2007 sebesar 29,82%, tahun 2008 sebesar 47,01%, tahun 2009 sebesar 40,60%, tahun 2010 sebesar 35,62%, tahun 2011 sebesar 39,10%, tahun 2012 sebesar 35,95%, tahun 2013 sebesar 45,75%. Berdasarkan kriteria Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten untuk tahun 2007 dapat dikatakan sedang, untuk tahun 2008 dapat dikatakan baik, untuk tahun 2009 dapat dikatakan baik, untuk tahun 2010 dapat dikatakan cukup, untuk tahun 2011 dapat dikatakan cukup, untuk tahun 2012 dapat dikatakan cukup, untuk tahun 2013 dapat dikatakan baik.

Hal ini dikarenakan kesenjangan Kinerja keuangan pada Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adanya perbedaan faktor-faktor penurunan pajak seperti insentif pajak yang berlebihan serta salah sasaran dan anjloknya pembayaran pajak oleh WP besar padahal usaha mereka sebenarnya meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada seperti: aparat pajak dapat meningkatkan dan mempercepat roda perputaran pajak dan aparat pajak tidak boleh melakukan dispensasi terhadap orang

atau kelompok tertentu sehingga dapat merugikan negara.

3. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan pada tabel 5, menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2007 sebesar Rp42.547.074.202 atau sebesar 4,87%. Tahun 2008 mengalami penurunan menjadi Rp38.347.614.632 atau sebesar 3,93% dari total pendapatan. Tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi Rp46.603.876.930 atau sebesar 4,73% dari total pendapatan. Tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp54886.005.749 atau sebesar 5,18% dari total pendapatan. Tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp72.290.993.848 atau sebesar 5,30% dari total pendapatan. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp84.755.834.704 atau sebesar 5,61% dari total pendapatan. Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp115.441.420.053 atau sebesar 6,65% dari total pendapatan.

Hasil perhitungan pada tabel 5, menunjukkan bahwa bantuan pemerintah pusat pada Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2007 sebesar Rp825.137.326.407 atau sebesar 94,44% dari total pendapatan. Tahun 2008 mengalami peningkatan dari segi bantuan menjadi Rp910.101.402.189 tapi mengalami penurunan dari segi presentase menjadi 93,16% dari total pendapatan. Tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi Rp922.915.374.294 atau sebesar 93,74% dari total pendapatan. Tahun 2010 mengalami peningkatan dari segi bantuan menjadi Rp972.029.599.717 tapi mengalami penurunan dari segi presentase menjadi 93,69% dari total pendapatan. Tahun 2011 mengalami peningkatan dari segi bantuan menjadi Rp1.145.206.557.368 tapi mengalami

penurunan dari segi presentase menjadi 83,95% dari total pendapatan. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp1.383.267.638.453 atau sebesar 91,51% dari total pendapatan. Tahun 2013 mengalami peningkatan dari segi bantuan menjadi Rp1.582.082.180.439 tapi mengalami penurunan dari segi presentase menjadi 91,16% dari total pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5, untuk Rasio Kemandirian dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Klaten untuk tahun 2007 sebesar 5,61%, tahun 2008 sebesar 4,21%, tahun 2009 sebesar 5,05%, tahun 2010 sebesar 5,65%, tahun 2011 sebesar 6,31%, tahun 2012 sebesar 6,13%, dan tahun 2013 sebesar 7,30%. Berdasarkan kriteria kemandirian terhadap kemampuan keuangan Kabupaten Klaten, maka untuk tahun 2007 dapat dikatakan rendah sekali, untuk tahun 2008 dapat dikatakan rendah sekali, untuk tahun 2009 dapat dikatakan rendah sekali, untuk tahun 2010 dapat dikatakan rendah sekali, untuk tahun 2011 dapat dikatakan rendah sekali, untuk tahun 2012 dapat dikatakan rendah sekali, untuk tahun 2013 dapat dikatakan rendah sekali. Jadi kemandirian keuangan Kabupaten Klaten secara keseluruhan dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan Kinerja Keuangan pada Rasio Kemandirian dikarenakan perbedaan faktor-faktor kontribusi Pendapatan Asli Daerah seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing

daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

4. Analisis *Trend*

Untuk Analisis *Trend* Rasio Efektivitas menggambarkan kecenderungan arah perkembangan efektivitas keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang cenderung meningkat yaitu dengan peningkatan sebesar 6,26% untuk setiap tahunnya dari awal perhitungan yang dilihat dari Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas.

Analisis *Trend* untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Kabupaten Klaten dari tahun 2007 hingga tahun 2013 menggambarkan kecenderungan arah perkembangan penerimaan pajak daerah serta kecenderungan arah perkembangan kemandirian keuangan yang cenderung naik, untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,86% untuk setiap tahunnya dari tahun awal perhitungan. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan Kinerja Keuangan pada Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan perbedaan faktor-faktor penurunan pajak seperti insentif pajak yang berlebihan serta salah sasaran dan anjloknya pembayaran pajak oleh WP besar padahal usaha mereka sebenarnya meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada seperti: aparat pajak dapat meningkatkan dan

mempercepat roda perputaran pajak dan aparat pajak tidak boleh melakukan dispensasi terhadap orang atau kelompok tertentu sehingga dapat merugikan negara.

Untuk Rasio Kemandirian mengalami kenaikan sebesar 0,41% untuk setiap tahunnya dari tahun awal perhitungan yang dilihat dari analisis *Trend* untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian terutama untuk tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan Kinerja Keuangan pada Rasio Kemandirian dikarenakan perbedaan faktor-faktor kontribusi Pendapatan Asli Daerah seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Efektivitas untuk tahun 2007, 2011, 2012, dan 2013 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten sudah efektif, karena nilai yang diperoleh pada tahun lebih dari 100%, yaitu sebesar 101,65%, 100,99%, 109,81%, dan 134,90%. Untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tidak efektif, karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%, yaitu sebesar 87,33%, 70,53%, dan 88,89%.
2. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten jika dilihat Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2007 sampai tahun 2013 Kinerja Keuangan

Kabupaten Klaten dapat digolongkan sedang hingga cenderung baik, nilai Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang paling rendah yaitu sebesar 29,82% terjadi pada tahun 2007 yang digolongkan sedang dan nilai Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten paling tinggi yaitu sebesar 47,01% terjadi pada tahun 2008 yang digolongkan baik.

3. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong sangat rendah, nilai Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,21%, sedangkan nilai Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,30%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.
4. Dilihat dari hasil perkiraan Kinerja Keuangan melalui Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten menggambarkan kecenderungan arah perkembangan Efektivitas dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang semakin meningkat yang dilihat dari Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas, sedangkan untuk Analisis *Trend* untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2007 hingga tahun 2013 menggambarkan kecenderungan arah penerimaan pajak daerah serta kecenderungan arah perkembangan kemandirian keuangan yang cenderung naik

yang dilihat dari Analisis *Trend* untuk Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten terutama untuk tahun 2014 dan 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- ___(2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arta Sadjiarto. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Universitas Kristen Petra.
- I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika dan Luh Gede Sri Artini. (2012). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana: Bali.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jusmawati. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mohamad Mahsun.(2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah.

- Prasetyo. (2011). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah Pada APBD 2006-2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ruslina Nadek. (2003). Analisis Rasio Keuangan Pada APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Sutaryo, dkk. (2010). *Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- ___33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Waskito Hadi. (2010). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Volume. 3. No. 1. Januari 2010 Hal. 29-51.